



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

Jalan Pandan No.02 Madiun Telp. (0351) 467527 Kode Pos 63121
Website : <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id>
Email : kelurahanpangongangan@madiunkota.go.id

Madiun, 20 Maret 2024

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun

di –

MADIUN

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 460/ 103 /401.302.7/2024

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dikirimkan dengan hormat Kecamatan Manguharjo Kota Madiun	1 (Satu) Berkas	Disampaikan untuk menjadikan periksa



Ditandatangani secara elektronik oleh
LURAH PANGONGANGAN

EVA ANJARIKA RAHMAWATI, S.STP
Penata
NIP. 19910623 201206 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://te.kominfo.go.id/>

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECEUALIKAN
DI LINGKUNGAN KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2024**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECEUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	Arsip daftar orang yang masuk G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H dan J ; b. UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf H 	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan :</p> <p>a. Dokumen Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran <p>b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>c. Memorandum/surat – surat penting yang perlu dirahasiakan</p> <p>d. Disposisi surat pimpinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17; - UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2) - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf I. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Selama masih berlangsung penyelenggaraannya - Selama status perlindungan masih berlaku - Sampai dengan proses penyelesaian konflik 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan hukum - Mengganggu kepentingan perlindungan hak - Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi - Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data lengkap yang dilindungi proses penegakan hukum - Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi - Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

3.	Data Pribadi Penduduk KK dan NIK	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf I. - UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2, Pasal 85 Ayat 1, 2 dan 3. - UU no 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat 1, Pasal 79 Ayat 1 	Permanen / atas ijin yang bersangkutan / kepentingan publik yang berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Berpotensi disalah gunakan 	Melindungi data pribadi
4	Penilaian Kinerja / Prestasi Kerja Pegawai	PP nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS	- Selama masih berlaku	Dapat disalah gunakan	Bisa menjaga keakuratan dan obyektifitas PNS
5	Keputusan ijin/ keterangan tentang perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf I. - UU no 8 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - PP Tahun 83 Jo, PP 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

	Data pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf H - UU no 23 Tahun 2006 		Data Pribadi bisa di salah gunakan	Melindungi data pribadi
7	Data Objek Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> -UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40; -UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17huruf j. 	Samapi ada perintah penegak hukum yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak 	- Melindungi dan mengamankan database obyek pajak
8	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP,pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia kekayaan pribadi 	- Melindungi rahasia kekayaan pribadi
9	Kode / Akses Password Aplikasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 11 ITE Pasal 30 ayat 1, 2 ,3 	Permanen	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak 	- Melindungi dan mengamankan data